

Judul : RUU Ormas Tetap Ditolak
Tanggal : Selasa, 25 Juni 2013
Surat Kabar : Republika
Halaman : 4

RUU Ormas Tetap Ditolak

Ira Sasmita, Dyah Ratna Meta Nova

Pansus RUU Ormas menyatakan telah mengakomodasi seluruh keberatan ormas.

JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Keasyarakatan (Ormas) rencananya laksanakan Selasa (25/6) ini melalui sidang paripurna di DPR. Sejumlah embaga keagamaan bersikeras menolak pengesahan rancangan regulasi tersebut.

"RUU Ormas akan mempersemat ruang partisipasi warga. Dan, nengingat kami semangat reformasi," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta, Senin (24/6). Menurutnya, RUU Ormas justru berpotensi menjerumuskan pemerintahan dalam otoriterisme.

Din melihat RUU Ormas masih berada dalam ruang lingkup hukum administratif yang mengancam rezim perizinan. Negara diberikan kewenangan penuh untuk memberi izin, mengatur larangan, prosedural, hingga sanksi. Menurut dia, asumsi tersebut melampaui batas dan inkonstitusional.

Pansus RUU Ormas, Din melanjutkan, memang telah berupaya mengakomodasi keberatan dari sejumlah ormas. Tetapi, menurut Din, bukan persoalan pasal per pasal yang ikhawatirkan ormas-ormas. Asumsi dasar yang dipakai panitia khusus RUU Ormas dan pemerintah dipandang Din dari awal sudah salah.

Sebab, RUU ormas dibentuk dengan tujuan mengatur ormas-ormas yang anarkis serta ormas yang mendapat bantuan dari luar negeri. Misalnya, pemerintah menguatkan penerapan hukum untuk mengatasi dua masalah tersebut.

Din juga menduga, RUU Ormas dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan untuk kepentingan Pemilu 2014. Mudah-mudahan pembentukan ormas tidak akan menjadi ajang barzakan anggaran oleh parpol dan dipakai

memobilisasi dukungan untuk Pemilu 2014.

Jika pemerintah dan DPR ingin menertibkan ormas dan perkumpulan, menurut Din, ada baiknya bisa diintegrasikan dengan pembahasan RUU Perkumpulan. Dia mengatakan, ormas keagamaan akan menempuh langkah *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika RUU Ormas disahkan.

Alasan penolakan lain disampaikan Sekretaris Eksekutif Komisi Kerassulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Suprpto. Lembaganya menentang pelaporan dana asing yang diterima ormas ke pemerintah. "Ormas sudah memiliki mekanisme pelaporan keuangan yang transparan kepada pihak yang melakukan kerja sama dengan ormas tersebut," ujarnya.

Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Bonar Simangunsong menyarankan dibentuk Dewan Ormas jika pemerintah khawatir kesulitan mengontrol perilaku ormas. Lembaga itu yang nantinya berhak memberikan sanksi kepada ormas jika melanggar, bukan pemerintah daerah dan pusat seperti yang tercantum dalam RUU Ormas.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, penolakan yang disampaikan ormas-ormas tidak memiliki dasar yang jelas. Dia menjelaskan, kebebasan dalam berdemokrasi bukan berarti kebebasan tanpa aturan.



Dalam catatan Kemendagri, saat ini terdapat lebih dari 90 ribu ormas di Indonesia. Perkembangan dinamis seperti itu, ujar Gamawan, membutuhkan payung hukum yang pasti.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Pramono Agung, mengatakan RUU Ormas bakal disahkan dalam sidang paripurna hari ini. Dia memperkirakan pihak-pihak yang keberatan dengan pasal-pasal di RUU Ormas untuk mengajukan uji materi-

ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pramono menyatakan, pengesahan RUU Ormas tidak mungkin ditunda lagi. Pasalnya, RUU Ormas sudah dibahas sebanyak delapan kali dengan melibatkan Pansus RUU Ormas, pimpinan DPR, dan perwakilan ormas. DPR juga sudah menyerap berbagai masukan dan kritik masyarakat soal isi RUU Ormas.

Salah satu fraksi di DPR yang cenderung meminta penundaan pe-

ngesahan RUU Ormas adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan mengatakan, mesti memiliki kedekatan, sikap PAN bukan karer penolakan Muhammadiyah.

"Tidak ada ke situ. Ini murni so kehati-hatian," kata Taufik ED meminta RUU Ormas dikaji lebih mendalam agar di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan.

Fraksi PKS menyatakan dukungan mereka terhadap RUU Ormas belum mutlak. PKS masih menentang draf akhir RUU Ormas.

Salah satu fraksi di DPR yang cenderung meminta penundaan pe-

Sumber: Pusat Data Republik